

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung Periode 2017 – 2021)

Chika Alifia Monica ¹, Tri Kunawangsih ²

^{1,2} Program Diploma Empat (D-IV) Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia

*Coressponding Author Email: chikaalifia68@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effects of inflation, the number of taxpayers, and a tax audit on income tax receipts. The factors utilized in this study are Duty Review, Number of Citizens and Expansion as Autonomous Factors and Annual Expense Receipts as Reliant Factors. All Individual and Corporate Income Tax Receipts, registered Individual and Entity Taxpayers, the number of SKPKBs issued at KPP Pratama Cibitung, and the amount of inflation published monthly by the Central Bureau of Statistics (BPS) of Bekasi Regency in 2017, 2018, 2019, 2020, and 2021 (time series data of 60 months) comprise the population of this study. The saturated sampling method was used for the study's sample, which included the entire population. This sort of exploration utilizes illustrative examination which expects to make sense of the easygoing connection between the factors that impact speculation testing. Using the SPSS version 23 program, multiple regression analysis was used as the analytical method. According to the findings of this study, the Variable of Tax Audit has an effect on Income Tax Receipts, the Variable of Number of Taxpayers has an effect on Income Tax Receipts, and the Variable of Inflation has an effect on Income Tax Receipts.

Kata Kunci: *Income Tax Receipt, Tax Audit.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tinjauan Tugas, Jumlah Penduduk dan Perluasan sebagai Faktor Otonom dan Penerimaan Biaya Tahunan sebagai Faktor Reliant. Seluruh Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar, jumlah SKPKB yang diterbitkan di KPP Pratama Cibitung, dan besaran inflasi yang dipublikasikan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi Tahun 2017, 2018, 2019, Tahun 2020, dan 2021 (data deret waktu 60 bulan) menjadi populasi penelitian ini. Metode sampling jenuh digunakan untuk sampel penelitian, yang mencakup seluruh populasi. Eksplorasi semacam ini menggunakan pemeriksaan ilustratif yang diharapkan dapat memahami hubungan santai antara faktor-faktor yang memengaruhi pengujian spekulasi. Menggunakan program SPSS versi 23, analisis regresi berganda digunakan sebagai metode analisis. Berdasarkan temuan penelitian ini, Variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, Variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, dan Variabel Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Received Maret 30, 2023; Revised April 12, 2023; Mei 01, 2023

* Chika Alifia Monica, chikaalifia68@gmail.com

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Penghasilan, Pemeriksaan Pajak.

PENDAHULUAN

Sudah menjadi rahasia umum bahwa negara adalah sumber baik pajak maupun pendapatan lainnya, yang digunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan bangsa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Kemampuan negara untuk membiayai pembangunan akan meningkat jika penerimaan pajak meningkat. Dengan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara terkait kemandirian, pajak berkontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan dalam negeri (Setyani, 2019). Pejabat mengatakan bahwa pada tahun 2017, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak atas pos-pos pajak yang berasal dari penghasilan yang diperoleh atau diterima selama satu tahun pajak. Oleh karena itu, pembayaran dari wilayah penggunaan individu menjadi bagian yang lebih penting daripada pembayaran dari tugas yang berbeda (Setyani, 2019). Di masa pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). The Willful Exposure Program (PPS) adalah salah satu pengaturan baru dalam Peraturan HPP. Salah satu tujuan utama PPS adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ada dua rencana atau strategi yang tersedia bagi PPS. Melalui Service of Money, otoritas publik membuat sejumlah kelonggaran, terutama terkait pelaksanaan kenaikan dan perpanjangan biaya serta perubahan asumsi ekonomi makro yang mempengaruhi pendapatan biaya (Layanan Uang, 2015).

METODE PENELITIAN

Ekspansi, jumlah penduduk, dan ulasan penilaian semua mempengaruhi penerimaan pengeluaran tahunan, seperti yang ditunjukkan oleh ulasan ini. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian penjelasan kuantitatif. Inflasi, pemeriksaan pajak penghasilan, dan jumlah wajib pajak merupakan variabel dependen penelitian. Populasi penelitian ini meliputi seluruh Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar, jumlah SKPKB yang diterbitkan di KPP Pratama Cibitung, dan besaran inflasi yang dilaporkan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi pada tahun tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan

2021. Sampel penelitian ini menggunakan sampling jenuh, dimana seluruh populasi dipilih sebagai sampel (Sugiyono, 2011). Ghozali (2016) mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan SPSS untuk menguji hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi selain analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan uji asumsi tradisional normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Seperti ditunjukkan oleh Ghozali (2016), ulasan ini menggunakan pemeriksaan terukur yang berbeda dan banyak investigasi relaps langsung dengan uji praduga konvensional dari ordinariness, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta uji spekulasi dengan uji t, uji F, dan uji koefisien penjaminan dengan bantuan pemrograman SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Penelitian ini mengkaji bagaimana penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak, jumlah wajib pajak, dan inflasi. Penelitian ini menggunakan empat variabel, tiga diantaranya merupakan variabel bebas yang diwakili oleh X1 (Pemeriksaan Pajak), X2 (Jumlah Wajib Pajak), dan X3 (Inflasi). Sedangkan satu variabel kelurahan diwakili oleh Y (Tanda Terima Penilaian Tahunan).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian berasal langsung dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung, berupa informasi tentang pemeriksaan pajak, jumlah wajib pajak, dan penerimaan pajak penghasilan. Sebaliknya, data inflasi merupakan data sekunder yang merupakan publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Semua 60 bagian data, yang berlangsung selama lima tahun dari Januari 2017 hingga Desember 2021, merupakan data deret waktu bulanan. Menurut Sugiyono (2011), sampel penelitian diambil dari seluruh populasi dengan menggunakan metode sampling jenuh. Berikutnya adalah garis besar informasi yang akan digunakan sebagai artikel dalam penelitian

Data Variabel X1 (Pemeriksaan Pajak)

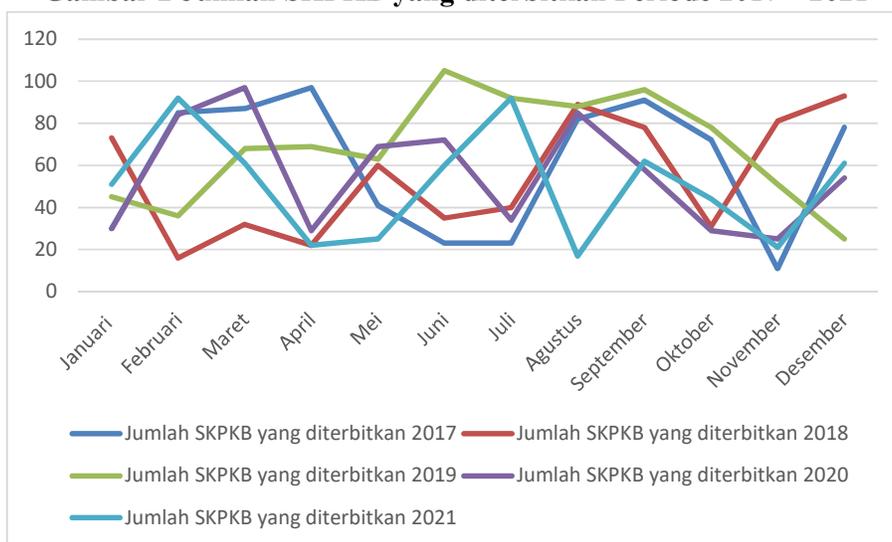
Tabel 1 Jumlah SKPKB yang diterbitkan Periode 2017 – 2021

Time Series	Jumlah SKPKB yang diterbitkan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	30	73	45	30	51
Februari	85	16	36	84	92
Maret	87	32	68	97	61
April	97	22	69	29	22
Mei	41	60	63	69	25
Juni	23	35	105	72	60
Juli	23	40	92	34	92
Agustus	82	89	88	85	17
September	91	78	96	58	62
Oktober	72	31	78	29	44
November	11	81	51	25	21
Desember	78	93	25	54	61

Sumber: KPP Pratama Cibitung, 2022

Informasi dalam tabel di atas ketika diperkenalkan dalam struktur grafis adalah sebagai berikut:

Gambar 2 Jumlah SKPKB yang diterbitkan Periode 2017 – 2021



Hasil pemeriksaan pajak mengungkapkan bahwa wajib pajak kurang membayar pajak yang terutang, yang menjadi alasan pertama diterbitkannya SKPKB. Penjelasan selanjutnya adalah adanya Surat Kecaman. Warga negara yang tidak menyampaikan SPT pada batas waktu akomodasi SPT akan mendapatkan Surat Ketetapan. Jika Surat Ketetapan sudah didapat, maka Warga Negara tidak menyampaikan SPT, penilaian akan

selesai dan persetujuan pengurus akan dipaksakan. Alasan ketiga diterbitkannya SKPKB adalah perlu atau tidaknya PPN atau PPnBM dikompensasi dengan tarif ekspor 0%. Penerbitan SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan data rutin dan khusus serta pemeriksaan pajak. Pemeriksa menambahkan sanksi administrasi sebesar seratus persen PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar ke dalam penghitungan pajak yang kurang dibayar.

Data Variabel X2 (Jumlah Wajib Pajak)

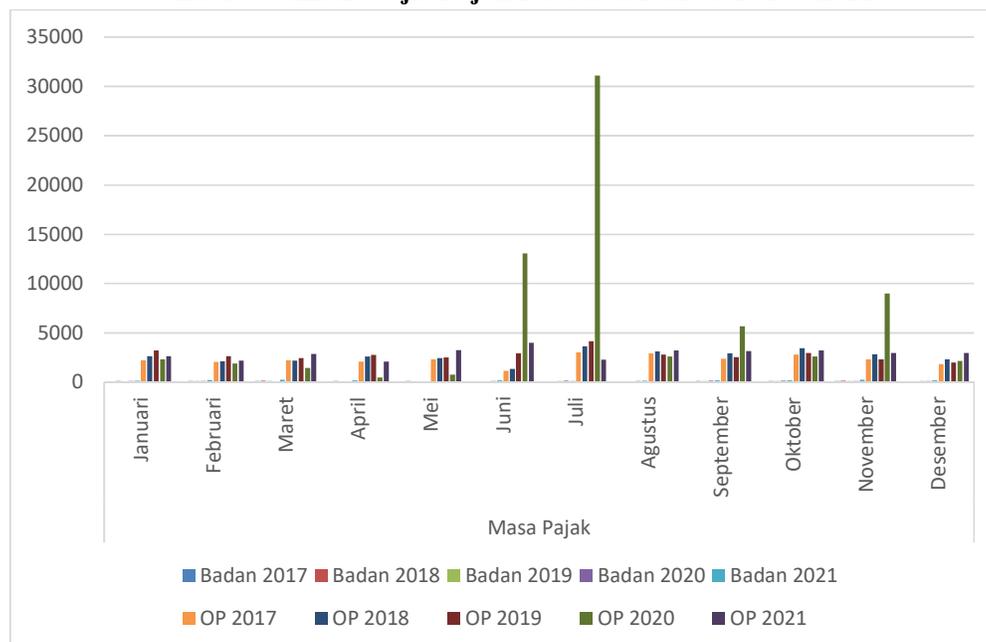
Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Periode 2017 – 2021

No	Jenis Wajib Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Badan	2017	105	115	140	99	108	64	81	109	105	111	133	110
		2018	126	119	148	121	119	44	89	110	121	143	148	101
		2019	77	120	138	97	94	66	143	102	124	130	120	131
		2020	120	140	90	55	56	117	149	135	168	154	132	131
		2021	166	224	240	187	110	195	128	157	189	181	250	205
2	OP	2017	2.230	2.064	2.226	2.114	2331	1.156	3.045	2.953	2.412	2.798	2.352	1.815
		2018	2.635	2.141	2.197	2.619	2473	1.384	3.647	3.133	2.960	3.466	2.855	2.326
		2019	3.218	2.661	2.466	2.782	2514	2.946	4.154	2.802	2.571	2.968	2.355	1.997
		2020	2.344	1.921	1.470	499	780	13.074	31.095	2.610	5.688	2.623	9.025	2.148
		2021	2.641	2.201	2.882	2.109	3251	4.015	2.271	3.211	3.166	3.211	2.971	2.967

Sumber: KPP Pratama Cibitung, 2022

Informasi dalam tabel di atas ketika diperkenalkan dalam struktur grafis adalah sebagai berikut:

Gambar 3 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Periode 2017 – 2021



Data Variabel X3 (Inflasi)

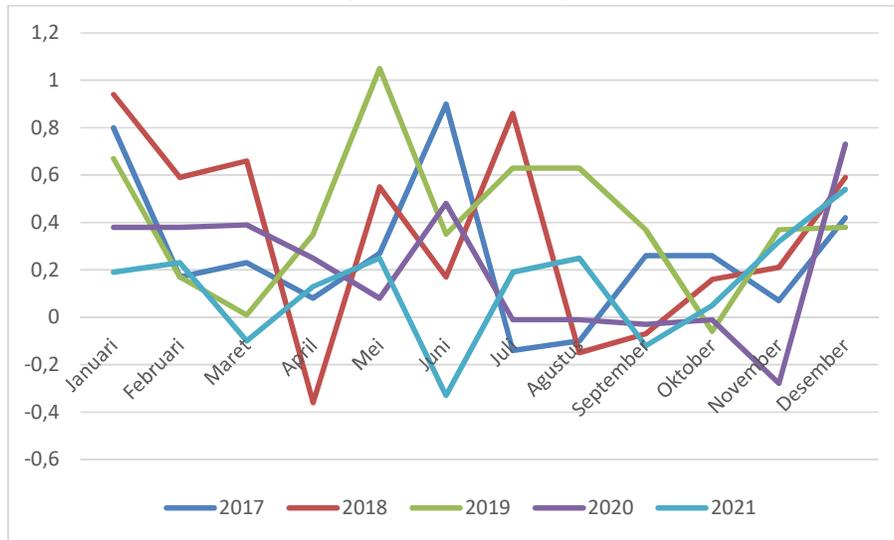
**Tabel 3 Inflasi Kabupaten Bekasi Periode 2017 -2021
(Dalam Persentase)**

Time Series	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	0,80	0,94	0,67	0,38	0,19
Februari	0,17	0,59	0,17	0,38	0,23
Maret	0,23	0,66	0,01	0,39	-0,10
April	0,08	-0,36	0,35	0,25	0,13
Mei	0,27	0,55	1,05	0,08	0,25
Juni	0,90	0,17	0,35	0,48	-0,33
Juli	-0,14	0,86	0,63	-0,01	0,19
Agustus	-0,10	-0,15	0,63	-0,01	0,25
September	0,26	-0,07	0,37	-0,03	-0,12
Oktober	0,26	0,16	-0,06	-0,01	0,05
November	0,07	0,21	0,37	-0,28	0,32
Desember	0,42	0,59	0,38	0,73	0,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, 2022

Jika dilihat dalam bentuk grafik, data pada tabel di atas adalah sebagai berikut:

**Gambar 4 Inflasi Kabupaten Bekasi Periode 2017 -2021
(Dalam Persentase)**



Dari informasi tersebut cenderung terlihat bahwa pada tahun 2020 tingkat ekspansi akan rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kecukupan pasokan, permintaan domestik yang melemah akibat pandemi Covid-19, serta sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga kestabilan harga di pusat dan daerah. Badan Pusat Statistik menegaskan, deflasi terjadi akibat penurunan beberapa indeks kelompok pengeluaran, antara lain: kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi.

Data Variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan)

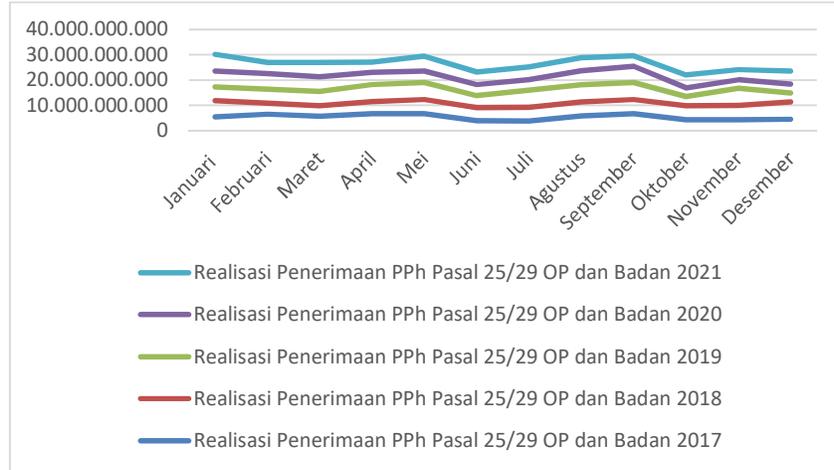
**Tabel 4 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP dan Badan
(Dalam Rupiah)**

Time Series	Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29 OP dan Badan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	5.468.957.822	6.315.558.624	5.421.436.796	6.291.752.787	6.611.275.566
Februari	6.534.678.081	4.261.867.576	5.564.520.671	6.204.504.019	4.426.301.423
Maret	5.604.815.822	4.163.699.212	5.649.980.876	5.854.784.588	5.709.168.103
April	6.726.203.460	4.727.644.605	6.755.386.489	4.809.782.597	4.077.819.115
Mei	6.749.856.752	5.511.668.983	6.762.017.736	4.446.662.040	5.914.554.278
Juni	3.826.318.027	5.299.446.887	4.655.095.939	4.387.267.765	4.938.467.434
Juli	3.713.691.631	5.480.064.774	6.762.762.311	4.083.149.838	5.113.995.289
Agustus	5.755.992.224	5.587.609.907	6.765.267.320	5.556.123.266	5.149.334.461
September	6.767.664.525	5.486.412.872	6.741.512.853	6.419.764.796	4.172.739.794
Oktober	4.289.524.241	5.497.025.121	3.616.607.282	3.451.047.950	5.157.961.616
November	4.245.557.048	5.661.794.188	6.846.371.236	3.296.297.476	4.092.849.744
Desember	4.415.697.513	6.870.113.601	3.551.817.244	3.537.018.773	5.113.064.080

Sumber: KPP Pratama Cibitung, 2022

Informasi dalam tabel di atas ketika diperkenalkan dalam struktur grafis adalah sebagai berikut:

Gambar 5 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP dan Badan



Hasil Analisis Penelitian dan Pembahasan

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Untuk mendapatkan gambaran umum dari data, pengukuran statistik deskriptif dari variabel ini diperlukan. Pengukuran tersebut meliputi standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu Pemeriksaan Wajib Pajak (X1), Jumlah Wajib Pajak (X2), Inflasi (X3), dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Y). Adapun akibat lanjutan dari pengujian faktual grafis tersebut dapat dilihat dengan baik pada tabel kuat 5 sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Statistics

	Pemeriksaan Pajak (X1)	Jumlah Wajib Pajak (X2)	INFLASI (X3)	Penerimaan PPh (Y)
N Valid	60	60	60	60
Missing	0	0	0	0
Mean	56,7500	2710,1500	,2707	5281172117,4500
Std. Error of Mean	3,46113	103,63248	,04139	137114481,27329
Median	60,0000	2717,5000	,2500	5474511298,0000
Mode	25.00 ^a	554.00 ^a	-.01 ^a	3296297476.00 ^a
Std. Deviation	26,80983	802,73372	,32062	1062084204,99062
Variance	718,767	644381,418	,103	1128022858490560000,000
Range	94,00	5302,00	1,41	3573816125,00
Minimum	11,00	554,00	-,36	3296297476,00
Maximum	105,00	5856,00	1,05	6870113601,00
Sum	3405,00	162609,00	16,24	316870327047,00

Sumber: Output SPSS 23, Data sekunder telah diolah

Berikut adalah gambaran sebaran data peneliti berdasarkan hasil uji deskriptif di atas:

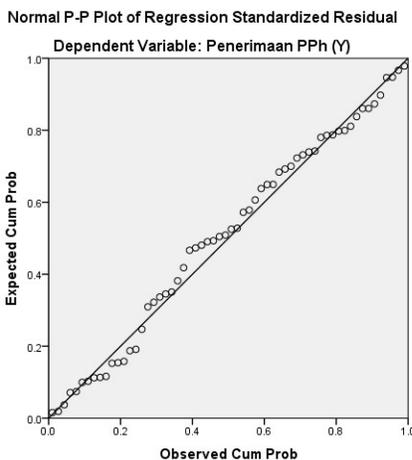
1. Dari data tersebut dapat digambarkan Variabel Pemeriksaan Pajak (X1) memiliki nilai minimal 11 dan nilai maksimal 105. Standar deviasi 26,80983 dan nilai rata-rata (mean) 56,75.
2. Variabel jumlah wajib pajak (X2) dapat digambarkan memiliki nilai antara 554 dan 5856,0 berdasarkan data tersebut. Standar deviasi adalah 802,73372, sedangkan nilai rata-rata (mean) adalah 2710,150.
3. Dari data tersebut dapat digambarkan variabel inflasi memiliki nilai minimal -0,36 dan nilai maksimal 1,05. Standar deviasi adalah 0,32062, sedangkan nilai rata-rata (mean) adalah 0,2707.
4. Variabel Pendapatan Pajak Tahunan, dari informasi tersebut dapat digambarkan bahwa nilai dasar adalah 3296297476,00 dan nilai terbesar adalah 6870113601,00. Standar deviasinya adalah 1062084204.99062, sedangkan nilai rata-ratanya adalah 5281172117.4500..

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Grafik plot normal, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6, menggambarkan hasil uji normalitas.

Gambar 6 Uji Normalitas



Sumber: Output SPSS 23, Data sekunder telah diolah

Hasil grafik P-P Plot pada Gambar 6 menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian karena titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas diharapkan dapat menguji model kekambuhan antar faktor bebas (variabel otonom). Model kekambuhan yang layak seharusnya tidak memiliki hubungan antara faktor bebas. Uji Multikolinearitas menghasilkan hasil sebagai berikut:.

Tabel 6 Uji Multikolinierities

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3206425515,105	493057591,283		6,503	,000		
Pemeriksaan Pajak (X1)	16988499,515	4416592,765	,429	3,847	,000	,986	1,014
Jumlah Wajib Pajak (X2)	325724,390	150307,480	,246	2,167	,034	,950	1,053
INFLASI (X3)	841948151,245	374352445,446	,254	2,249	,028	,960	1,042

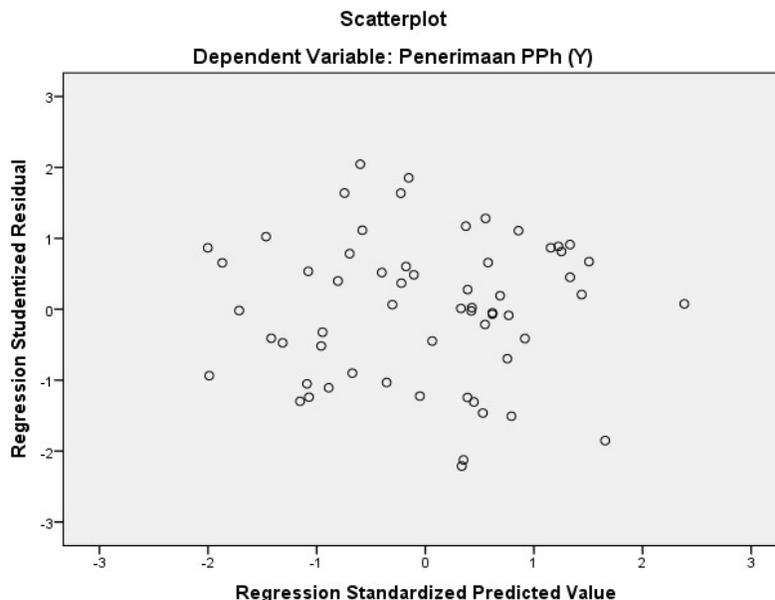
a. Dependent Variable: Penerimaan PPh (Y)

Sumber: Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, Hasil SPSS 23 menunjukkan bahwa informasi opsional telah ditangani. Nilai VIF kurang dari 10, dan nilai tolerance seluruh variabel independen (Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak, dan Inflasi) lebih besar dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam informasi yang digunakan dalam ulasan ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mencari ketidaksamaan varian antara residual pengamatan yang berbeda dalam model regresi. Hasil Uji Heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:.

Gambar 7 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 23, Data sekunder telah diolah

Karena titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak ada pola yang terlihat, temuan grafik Scatterplot menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berencana untuk memutuskan apakah model relaps lurus memiliki hubungan antara kesalahan periode lalu ($t-1$) dan kesalahan membingungkan pada periode t . Ketika ada korelasi, ada penyakit autokorelasi. Hasil Uji Autokorelasi disajikan pada Tabel 7..

Tabel 7 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.560 ^a	,314	,277	903174324,79307	1,716

a. Predictors: (Constant), INFLASI (X3), Pemeriksaan Pajak (X1), Jumlah Wajib Pajak (X2)

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh (Y)

Sumber: Output SPSS 23, Data sekunder telah diolah

Hasil Durbin-Watson adalah 1,716, yaitu antara -2 dan +2, berdasarkan pengolahan data dari tabel 7. Hal ini menunjukkan tidak adanya autokorelasi..

Hasil Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Uji Analisis Regresi Linear Berganda menghasilkan hasil sebagai berikut:

Tabel 8
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3206425515,105	493057591,283		6,503	,000
Pemeriksaan Pajak (X1)	16988499,515	4416592,765	,429	3,847	,000
Jumlah Wajib Pajak (X2)	325724,390	150307,480	,246	2,167	,034
INFLASI (X3)	841948151,245	374352445,446	,254	2,249	,028

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh (Y)

Sumber: Output SPSS 23, Data sekunder telah diolah

Persamaan regresi linier berganda dengan dua variabel bebas adalah sebagai berikut, sebagaimana ditentukan oleh tabel 8.:

$$Y_t = \alpha + b_1 X_{1t} + b_2 X_{2t} + b_3 X_{3t} + e_t$$

Keterangan:

Y = Penerimaan PPh (Variabel Dependen)

α = Konstanta (Yaitu nilai Y jika X₁, X₂ = 0)

b₁₋₃ = Koefisien regresi, (yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X₁, X₂, X₃)

X₁ = Pemeriksaan Pajak (Variabel Independen)

X₂ = Jumlah Wajib Pajak (Variabel Independen)

X₃ = Inflasi (Variabel Independen)

Nilai hasil pengujian kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23 dengan cara sebagai berikut:

$$Y = 3206425515,105 + 16988499,515 (X_1) + 325724,390 (X_2) + 841948151,245 (X_3)$$

Berikut ini adalah interpretasi dari bentuk persamaan regresi:

1. Nilai konstanta (a) adalah 3206425515,105. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen penerimaan PPh memiliki nilai rata-rata positif sebesar 3206425515,105 jika kedua variabel independen konstan atau nol.
2. Dengan nilai koefisien positif sebesar 16988499,515 untuk variabel independen Pemeriksaan Pajak (X_1), dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan atau tetap, setiap kenaikan satu satuan pada variabel Pemeriksaan Pajak akan menghasilkan peningkatan sebesar 16988499,515 satuan untuk rata-rata Pajak Variabel audit.
3. Variabel bebas Jumlah Wajib Pajak (X_2) memiliki nilai koefisien positif sebesar 325724,390. Hal ini menunjukkan bahwa dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap atau tetap, maka setiap kenaikan variabel Jumlah Wajib Pajak akan menghasilkan rata-rata kenaikan sebesar 325724.390 unit.
4. Dengan nilai koefisien positif sebesar 841948151,245 untuk variabel bebas inflasi (X_3), dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap konstan atau tetap, setiap kenaikan satu satuan pada variabel inflasi akan menghasilkan kenaikan rata-rata variabel inflasi sebesar 841948151,245 satuan..

Hasil Uji t (Parsial)

Uji Signifikansi Parsial (Uji T) digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kontribusi masing-masing variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen. Hasil uji T adalah sebagai berikut..

**Tabel 9 Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3206425515,105	493057591,283		6,503	,000
Pemeriksaan Pajak (X1)	16988499,515	4416592,765	,429	3,847	,000
Jumlah Wajib Pajak (X2)	325724,390	150307,480	,246	2,167	,034
INFLASI (X3)	841948151,245	374352445,446	,254	2,249	,028

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh (Y)

Sumber: Output SPSS 23, Data sekunder telah diolah

Untuk memahami efek lanjutan dari uji t (pecahan) pada tabel 4.9, pertama-tama hitunglah tabel t. Diketahui taraf signifikansi $0,05/2 = 0,025$, dan distribusinya adalah $t = n-k-1$ atau $60-3-1 = 56$. Jika jumlah sampel 56 dan taraf signifikansi 0,025, maka nilai ttabel sebesar 2.003 dapat diperoleh. Setelah selesainya uji t, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai thitung adalah 3,847, dan nilai ttabel adalah 2,003, seperti terlihat pada tabel pemeriksaan pajak 4.9. Terlihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel (3,847 > 2,003). Sementara itu, tingkat signifikansi 0,00 < 0,05 menunjukkan berada pada daerah H1 yang menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara parsial.
2. Berdasarkan tabel 4.9, jumlah wajib pajak adalah 2.167, dan tabel tersebut adalah 2.003. Terlihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel (2,167 > 2,003). Sedangkan dengan tingkat signifikansi 0,034 < 0,05 diterima berada pada daerah H2 yang menunjukkan bahwa variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
3. Berdasarkan tabel 9 terlihat bahwa thitung adalah 2,249 dan ttabel adalah 2,003. Terlihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel (2,249 > 2,003). Sedangkan tingkat signifikansi 0,028 < 0,05 menunjukkan berada pada daerah H3 yang menunjukkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara parsial.

Hasil Uji F (Global)

Untuk menentukan layak atau tidaknya model regresi penelitian, digunakan uji signifikansi global (uji F) untuk mengukur signifikansi global atau signifikansi bersama variabel Y.

Hasil uji F adalah sebagai berikut: Tabel 10 Hasil Uji F (Global)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	20872812436879400000,000	3	6957604145626480000,000	8,529	.000 ^b
Residual	45680536214063800000,000	56	815723860965425000,000		
Total	66553348650943200000,000	59			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh (Y)

b. Predictors: (Constant), INFLASI (X3), Pemeriksaan Pajak (X1), Jumlah Wajib Pajak (X2)

Sumber: Output SPSS 23, Data sekunder telah diolah

Dilihat dari Tabel 10 diketahui bahwa nilai Fhitung adalah 8,529 sedangkan pada Ftabel 2,76 sangat baik terlihat bahwa Fhitung > Ftabel (8,529 < 2,76). Sedangkan nilai signifikan 0,000 < 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Karena Ho4 ditolak dan Ha4 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak global atau gabungan, jumlah wajib pajak, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa baik model dapat menjelaskan perubahan variabel dependen. Uji Koefisien Determinasi menghasilkan hasil sebagai berikut:

Tabel 11 Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.560 ^a	.314	.277	903174324,79307

a. Predictors: (Constant), INFLASI (X3), Pemeriksaan Pajak (X1), Jumlah Wajib Pajak (X2)

Sumber: Output SPSS 23, Data sekunder telah diolah

Berdasarkan Tabel 11, koefisien determinasi adalah 0,314 atau 31,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak, dan Inflasi masing-masing dapat memiliki variansi yang dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 31,4%. Sementara itu, kelebihan 0,686 atau 68% tersebut dijelaskan oleh beberapa faktor yang tidak tercakup dalam ulasan ini.

Pembahasan Temuan Studi

Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pengaruh Pemeriksaan Pajak Hasil pengujian masing-masing menghasilkan thitung sebesar 3,847 dan ttabel sebesar 2,003. Terlihat sangat jelas bahwa thitung lebih menonjol daripada ttabel (3,847 > 2,003). Sebaliknya, tingkat signifikansi 0,00 < 0,05 pada daerah H1 menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara parsial. Hal ini sejalan dengan pandangan Setyani (2022) yang menegaskan bahwa salah satu ciri kenaikan iuran adalah bahwa peninjauan tarif memberikan penekanan yang signifikan pada warga yang diinstruksikan untuk melaporkan SPT secara tidak benar. Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan produk hukum pemeriksaan pajak yang dapat digunakan untuk mencegah negara memberikan uang kepada pihak lain, khususnya penerimaan pajak. Semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak akan dapat meningkatkan pemeriksaan pajak apabila dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan hambatan-hambatan pelaksanaannya dapat diatasi.

Dampak Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Tes menemukan thitung 2,167 dan ttabel 2,003. Terlihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel (2,167 > 2,003). Sedangkan daerah H2 menerima tingkat signifikansi 0,034 < 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Azizah (2018) yang menegaskan bahwa upaya harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak karena kontribusi mereka yang signifikan terhadap operasi sistem dan penerimaan pajak penghasilan. Salah satu pendekatannya adalah dengan menempatkan fasilitas sunset policy yang berpotensi mempengaruhi dan memperluas jumlah wajib pajak..

Dampak Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

thitung adalah 2,249, dan ttabel adalah 2,003, seperti yang ditentukan oleh tes. Terlihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel (2,249 > 2,003). Sementara itu, tingkat signifikansi 0,028 < 0,05 menunjukkan bahwa terletak pada daerah H3 yang menunjukkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini berbeda dengan pendapat Setyani (2019) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak penghasilan tidak terpengaruh oleh inflasi. Masyarakat akan mengurangi pengeluaran akibat kenaikan harga barang dan turunnya nilai mata uang, sehingga tingkat inflasi dapat berdampak pada penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan banyaknya uang yang beredar di masyarakat sehingga membuat mata uang menjadi kurang bernilai. Tingkat pengeluaran masyarakat mengalami penurunan yang berdampak pada penurunan pendapatan yang diterima, yang mengakibatkan berkurangnya pajak yang dibayarkan kepada negara. Akibatnya, banyak pelaku usaha atau badan usaha yang tidak mampu memasarkan produknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan temuan penelitian hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Variabel pemeriksaan pajak, jumlah wajib pajak, dan inflasi global semuanya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Cibitung. Pada Kantor Administrasi Pengeluaran Esensial (KPP) Cibitung pendapatan bea pribadi secara fundamental dipengaruhi oleh variabel Review Penilaian. Perubahan jumlah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Variabel Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung.

Saran

Penelitian ini dapat menawarkan sejumlah rekomendasi berdasarkan temuan penelitian, antara lain:

Penelitian ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan perpajakan terkait pemeriksaan KPP. Karena wajib pajak merupakan komponen yang sangat penting dalam memberikan kontribusi penerimaan pajak penghasilan, maka strategi-strategi yang diperlukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak sebaiknya disertakan. Strategi tersebut antara lain memperluas basis pajak dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Inflasi dan perkembangan ekonomi makro lainnya harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah diharapkan mampu menjaga Indeks Harga Konsumen untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah. Hal ini akan dilakukan dengan mengawasi harga-harga yang cenderung naik pada waktu-waktu tertentu dan penyediaan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan untuk mencegah penyelundupan, yang biasanya mengakibatkan pedagang untung menaikkan harga kebutuhan tertentu. Karena masih banyak potensi lain yang dapat menjadi faktor penentu dalam menunjang penerimaan pajak, peneliti tambahan dapat menambahkan jangka waktu lebih dari lima tahun agar dapat menemukan dan menganalisis kondisi tambahan di luar tahun penelitian ini. Selain itu, mereka dapat menambahkan faktor tambahan di luar penelitian ini. pendapatan, selain variabel ekonomi makro lainnya seperti suku bunga dan nilai tukar, strategi intensifikasi pajak lainnya seperti pengumpulan pajak dan strategi perpanjangan pajak seperti memberikan nasihat kepada pembayar pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, I. R. (2016). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alif Adi Prasetyawan, R. M. (2019). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada KPP Malang Selatan Periode 2013-2018). *e – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*.
- Bagus Aprilianto, A. H. (2020). Pengaruh Bisnis E-Commerce dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Kelapa Gading). *EkoPreneur Vol. 1 No. 2 Jun 2020*.
- Boediono. (2014). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPF E.
- Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ferry Irawan, P. R. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Pengemasku Vol. 1 No. 2*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM 23*. Semarang: UNDIP.
- Halimatus Sa'diyah, D. P. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Penduduk dan Luas Lahan terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*.
- Kementerian Keuangan. (2017 - 2021). *Realisasi APBN Tahun Anggaran 2017 - 2021*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Meida Nurul Azizah, S. A. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Tegal. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*.
- Nicola Putra Pratama, D. R. (2016). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010 Sampai 2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1*.
- Novi Purnama Dewi, M. Y. (2018). Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan KPP Pratama Cirebon. *Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 2, (2)*, 210-224.
- Nunung Latofah, D. H. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*.
- Olivia Jessica Yusuf Kastolani, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting, vol. 6, no. 3, pp. 669-679*.
- Putong, I. (2008). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Putri Nadia, R. K. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.
- Rahmah Intan Syahputri, M. (2020). Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pada Direktorat Jenderal Pajak.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 9 Buku 1*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sari Zawitri, N. K. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Tahun 2020. *Eksos*.
- Sari, W. P. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jom FEKON Vol.2 No.2*.
- Seruni J. Prang, S. S. (2017). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP DAN PENETAPAN AKUNTANSI PADA PT. BANK SULUTGO (PERSERO) TBK. CABANG UTAMA. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*.
- Statistik, B. P. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.